

Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Bantul Yogyakarta

M. Said Lidamona¹, Citra Ayudiati²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

msaidlidamonakabau@email.com¹, cayudiatii@gmail.com²

Abstract

This study aims to evaluate the Implementation of accountability and transparency in the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Kasihan District, Bantul, Yogyakarta. Accountability and transparency are two elements in BUMDes management that aim to increase public trust and the effectiveness of business management. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The subjects of the study consisted of BUMDes management, village officials, and the local community. The results of the study indicate that the Implementation of accountability in BUMdes Kasihan District has been running quite well, marked by routine financial reporting and internal monitoring mechanisms. However, there are still several obstacles, such as the lack of understanding of managers regarding accountability procedures and limited human resources. In terms of transparency, BUMDes has made several efforts such as publishing financial reports and business activities through information boards and social media. However, community participation in the decision-making process still needs to be improved..

Keywords: Implementation of Accountability and Transparency. Village-Owned Enterprises.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Akuntabilitas dan transparansi adalah dua elemen dalam pengelolaan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan Masyarakat dan efektivitas pengelolaan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari pengelolaan BUMDes, aparat desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi akuntabilitas di BUMdes Kecamatan Kasihan telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya pelaporan keuangan yang rutin dan mekanisme pengawasan internal. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman pengelola mengenai prosedur akuntabilitas dan Keterbatasan sumber daya manusia. Dari sisi transparansi, BUMDes telah melakukan beberapa Upaya seperti publikasi Laporan keuangan dan kegiatan usaha melalui papan informasi dan media sosial. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan masih perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Implementasi Akuntabilitas Dan Transparansi. Badan Usaha Milik Desa.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya local ke pasar. (Srimuliana dkk, 2022).

Asas pengelolaan keuangan tentunya mempunyai prinsip yang memikat agar bisa sesuai dengan prinsip tersebut. Pengelolaan keuangan tentunya akan berjalan bisa sesuai dengan prinsip tersebut. Pengelolaan keuangan tentunya akan berjalan juga apabila sesuai dengan anggaran yang ada dan anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang menunjang pengembangan masyarakat. Namun faktor yang terjadi, belum banyak pengelola keuangan yang menggunakan anggaran ataupun dana desa untuk kegiatan yang seharusnya dilaksanakan. Banyak pemerintah desa



belum menjalankan pengelolaan keuangannya yang berdasarkan UU nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Indrawan, dalam Hanifa 2021), Dengannya perlu kata mufakat atau musyawarah antara pemerintah desa, masyarakat dan pengelola keuangan itu sendiri untuk merancang anggaran mana dan kegiatan usaha apa yang bisa menunjang pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan yang menyangkut dengan akuntabilitas. (Ibrahhim, 2018). Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan Rumusan masalah sebagai berikut, Apakah akuntabilitas berdampak terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kasihan Bantul Yogyakarta, Apakah transparansi berdampak dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kasihan Bantul Yogyakarta?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini berisi tentang kerangka rasional dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan badan usaha milik desa di desa kasihan bantul yogyakarta. metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. (Sugiyono,2020)



(Creswell, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Wawancara Dampak Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolahan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Kasihan Bantul Yogyakarta. Bagaimana implementasi akuntabilitas di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kasihan Bantul, Yogyakarta

Narasumber pertama : Agil

Jabatan : Sekretaris BUMKAL/BUMDES Kel Bangunjiwo.

Mengatakan bahwa: Penerapan akutanbilitas masih menggunakan format lama untuk membuat masyarakat juga bisa memahami terkait dengan transparansi dalam keuangan karna tidak semua murni di adobsi dalam system akutansi hal ini dikarenakan beberapa pengurus tidak mempunyai besik akutansi.

Narasumber kedua : Nofia Hapsari, S.Psi

Jabatan : Direktur BUMKAL/BUMDES kel Tirtonirmolo

Mengatakan bahwa : akuntabilitas melalui badan pengawasan dari desa dan bamunkal yang di sahkan oleh kelurahan melalui musyawarah kelurahan dan di sahkan oleh satu orang yaitu pak iman munandar S.H ada lapor tahunan dan juga melalui laporan semesteran atau per enam bulan dan tahunan hal itu juga melalui musyawarah kelurahan, dari pangawan itu ada dar pemerintah desa, pemerintah kelurahan bumkal, dan masyarakat itu sendiri.

Kesimpulan : Hasil dari jawaban narasumber diatas terdapat persamaan dari jawaban yaitu Menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional dan

adanya pelaporan keuangan berkala, baik harian, bulanan, maupun tahunan. melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan, termasuk pemerintah desa, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Terdapat juga perbedaan dari masing-masing narasumber hal ini dikarenakan Lokasi bumkal yang berbeda-beda.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap kepala unit terlibat langsung dalam memantau dan melaporkan aktivitas keuangan yang terjadi di unit mereka masing-masing dan juga terdapat Pengganti Sif dan Pelaporan Ketika terjadi pergantian staf atau perubahan di dalam unit, seperti penggantian Sif, informasi ini juga dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini menunjukkan adanya prosedur yang jelas dalam melaporkan perubahan di unit agar pengawasan dapat tetap efektif. Bagaimana peran masyarakat dalam memonitor dan mengevaluasi akuntabilitas dalam kegiatan bumkal/bumdes ?

Narasumber pertama : Agil

Jabatan: Sekretaris BUMKAL/BUMDES Kel Bangunjiwo

Mengatakan bahwa : kalo dari kami pihak bumkal bangunjiwo itu kami melibat masyarakat dalam bermusyawarah kemudian kelurahan juga turut terlibat dalam membahas berbagai kegiatan dan laporan keuangan Bumkal/Bumdes. Dalam forum ini, warga dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan kritik atau saran terkait kinerja Bumkal/Bumdes. Kami dari pihak bumkal sangat terbuka.

Narasumber kedua : Nofia Hapsari, S.Psi

Jabatan: Direktur BUMKAL/BUMDES kel Tirtonirmolo

Mengatakan bahwa : Peran masyarakat di musyawarah kelurahan yang di adakan satu tahun dua kali program kerja di tahun mendatang dalam kehadiran masyarakat itu sangat penting untuk mengetahui terkait dengan laporan pertanggung jawaban, agar Laporan tersebut bisa di terima dan bisa disahkan Laporan tersebut.

Kesimpulan: Semua Narasumber menekankan pentingnya musyawarah sebagai forum utama untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan baik di Bangunjiwo dan Tirtonirmolo maupun Tamantirto, masyarakat diundang untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa atau kelurahan. menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan kritik atau saran terkait kinerja BUMDes/BUMKal.

Hal ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi aktif dari Masyarakat. Terdapat juga perbedaan yaitu pertama Di Bangunjiwo, masyarakat terlibat dalam membahas berbagai kegiatan dan laporan keuangan BUMDes/BUMKal secara umum.

Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami secara jelas bagaimana dana desa dikelola dan digunakan untuk memberikan ruang kepada Masyarakat dalam mengajukan masukan pertanyaan, dan menyampaikan kritik atau saran terkait kinerja BUMKal/BUMDes. Ini memastikan bahwa setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan Keputusan.

Hasil Kuesioner Dampak Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan

Hasil dari jawaban responden terhadap keterlibatan dalam usaha bumdes yaitu 10 (sepuluh) responden menjawab Ya. Keterlibatan yang dimaksud dalam hal ini adalah Melibatkan masyarakat dalam usaha Bumdes Keterlibatan masyarakat dalam usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangatlah penting untuk keberhasilan dan keberlanjutannya khususnya pada Badan usaha milik kelurahan Bangunjiwo, tirtonirmolo dan tamantirto.

Kesimpulan: Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan BUMDes, BUMDes di Kelurahan Bangunjiwo, Tirtonirmolo, dan Tamantirto akan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat desa, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.



Penilaian positif ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, mengindikasikan bahwa BUMDes dipandang sebagai lembaga yang mampu mengelola usaha dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata. Dengan mayoritas responden memberikan penilaian sangat bagus, dapat disimpulkan bahwa usaha BUMDes berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi desa. Ini bisa berarti peningkatan pendapatan, pengurangan tingkat kemiskinan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Hasil ini juga menekankan pentingnya peran strategis BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Hasil penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bangunjiwo, Tirtonirmolo, dan Tamantirto telah berhasil menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Mereka telah memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelaporan keuangan yang transparan, keterlibatan dalam proses evaluasi, dan penggunaan teknologi untuk penyebaran informasi. Pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa juga terbilang baik, melalui mekanisme internal, pemerintah desa, pihak eksternal, dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian penulis tersebut adalah pentingnya untuk terus meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Dan Badan Usaha Milik Desa belum bisa menjawab pertanyaan 6-10 dipenelitian selanjutnya agar bisa lebih mendalam lagi untuk memperkuat ke berhasilan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang keuangan juga perlu terus ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Maka dari penelitian harus menggunakan laporan keuangan dan harus sesuai dengan standar akuntansi atau standar akuntansi keuangan etap.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, dkk. 2011. *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Achmad Fariz Ramadhan, dkk 2019. *Perbedaan Derajat Kecemasan Antara Mahasiswa Tahap Akademik Tingkat Awal dengan Tingkat Akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*.
- Anak Agung Ayu Sita Matallia Sari, dkk 2023. *Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kabupaten Bangli*. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*. Vol.04:No.01.
- Afifa Rachmanda Filya. 2018. *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)*. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. Vol. 5, No. 1.
- pers. Bungin burhan. 2015. *metodologi penelitian kualitatif*. jakarta rajawali.
- Creswell, J. W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Offset.Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid III*. Yogyakarta: Andi.
- Indrawan, R., & Yaniawati, P. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..
- Ibrahhim. 2018. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kawasan Tambang*. Yogyakarta: PT LeutikaPrio,
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.



- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nasution. 1996. Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Rukayat. 2021. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Iklim Sekolah, Kinerja Mengajar Guru terhadap Produktivitas Sekolah, Issue 1, V-30, 118. Refika
- Aditama Kualitatif, dan Campuran (N. F. Atif (ed.); Revisi).
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. 2016. Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2) 110–126.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 20(2), 110– 126.
- Rukayat, 2021 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Iklim Sekolah, Kinerja Mengajar Guru terhadap Produktivitas Sekolah, Issue 1, V-30, 118
- Northcott, D., & Taulapapa, T. M., (2012). Using the Balanced Scorecard to Manage Performance in Public Sector Organization Issues and Challenges. International Journal of Public Sector Management, Vol. 25 No. 3 166-191.
- Mullon, P. A., & Ngoepe, M. (2019). An integrated framework to elevate information governance to a national level in South Africa. Records Management Journal, 29(1–2), 103116. <https://doi.org/10.1108/RMJ-09-2018-0030>
- Bastian, I. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik (M. Masykur (ed.)). Salemba Empat.
- Syamsul., Zuhroh, Siti. 2021. Implementasi E-Government: Dampaknya Pada Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 5 No. 1. Iskandar.
2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada.

